

**PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH AKIBAT IBU MENGALAMI
KETERBELAKANGAN MENTAL**

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko

Nomor:39/Pdt.P/2019/PA.Mkm)

SKRIPSI

Oleh:

Ibrahim Munib

17210080



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH AKIBAT IBU MENGALAMI
KETERBELAKANGAN MENTAL**

**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko
Nomor:39/Pdt.P/2019/PA.Mkm)**

SKRIPSI

Oleh:

Ibrahim Munib

17210080



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH AKIBAT IBU MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko

Nomor:39/Pdt.P/2019/PA.Mkm)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 Desember 2021

Penulis



Ibrahim Munib

NIM 17210080

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ibrahim Munib dengan NIM 17210080 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH AKIBAT IBU MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko

Nomor:39/Pdt.P/2019/PA.Mkm)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Kepala Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Malang, 26 Mei 2021
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003



Siti Zulaicha, M.Hum
NIP.198703272020122002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i IBRAHIM MUNIB, NIM 17210080, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH AKIBAT IBU MENGALAMI

KETERBELAKANGAN MENTAL

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko

Nomor:39/Pdt.P/2019/PA.Mkm)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 09 Desember 2021 Dekan,


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).

Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

(QS. Al-Ahzab: 4).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH AKIBAT IBU MENGALAMI

KETERBELAKANGAN MENTAL

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko

Nomor:39/Pdt.P/2019/PA.Mkm)

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku

perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Siti Zulaicha, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis, dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag., selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
7. Kepada keluarga saya terkhususnya Bapak Thamrin dan Ibu Irda Lifzarni selaku orang tua yang sangat dicintai penulis yang tidak henti-hentinya memberi motivasi kepada penulis.

8. Teman-teman seperjuangan saya selama mengenyam Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman HKI angkatan 2017.
9. Untuk Kota Malang yang bukan hanya urusan wilayah belaka lebih jauh dari itu melibatkan kenangan, pelajaran dan keindahannya; Terima kasih atas segalanya

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Karena penulis adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak dalam rangka *tafaqquh fi 'ilmillah*.

Malang, 26 Mei 2021

Penulis,



Ibrahim Munib

17210080

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi Oprasional	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Pengertian Perwalian.....	22
B. Tinjauan Hukum Perwalian.....	25
1. Perwalian dalam KUH Perdata	25
2. Perwalian dalam Undang-Undang Perkawinan	39

3. Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam	43
4. Perwalian dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	46
5. Perwalian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	48
C. Keterbelakangan Mental (Retardasi Mental)	50
BAB III.....	54
PEMBAHASAN	54
A. Deskripsi Tentang Duduk Perkara pada Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm	54
B. Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm Tentang Perwalian Anak Luar Nikah Akibat Ibu Mengalami Keterbelakangan Mental	57
C. Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak	67
BAB IV	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu

ABSTRAK

Munib, Ibrahim, 17210080, 2021. **PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH AKIBAT IBU MENGALAMI KETERBELAKANGAN MENTAL (Studi Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor:39/Pdt.P/2019/PA.Mkm).** Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaicha, M.Hum.

Kata Kunci: Perwalian, Anak Luar Nikah, Keterbelakangan Mental, Penetapan.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sehingga apabila seorang anak memiliki orang tua yang tidak cakap perbuatan hukum, maka ditunjuk seorang wali melalui penetapan pengadilan. Hakim dalam membuat penetapan harus memuat alasan dan dasar hukum pertimbangannya dengan teliti, agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan penetapan tidak cukup pertimbangan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk menjelaskan pertimbangan hakim yang mengabulkan penetapan Pengadilan Agama Mukomuko dengan nomor: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm tentang perwalian anak luar nikah akibat ibu mengalami keterbelakangan mental. 2) Untuk menjelaskan penetapan Pengadilan Agama Mukomuko dengan nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan studi pustaka atau *library research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hasil penelitian: 1) Dalam perkara di Pengadilan Agama Mukomuko nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm hakim hanya menggunakan dua dasar hukum dalam pertimbangannya, yaitu pasal 379 KUH Perdata dan pasal 51 ayat (2) undang-undang perkawinan. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali terdapat syarat yang tidak terpenuhi dalam permohonan yang seharusnya dilampirkan karena akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan wali. 2) Penetapan nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm jika dilihat dari perspektif undang-undang perlindungan anak terkait status perwalian anak jika anak tersebut menikah sebelum usia 18 tahun tidak mengakibatkan berakhirnya perwalian, perubahan terjadi hanya pada anak tersebut sudah menjadi individu yang cakap hukum. Akan tetapi hak dan kewajiban seorang wali terhadap anak masih ada.

ABSTRACT

Munib, Ibrahim, 17210080, 2021. **GUARDIANSHIP OF EXTRAMARITAL CHILDREN DUE TO MOTHERS EXPERIENCING MENTAL RETARDATION (Study determination of Mukomuko Religious Court Number:39/Pdt.P/2019/PA. Mkm).** Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Siti Zulaicha, M.Hum.

Keywords: Guardianship, Extramarital Child, Mental Retardation, Determination.

Guardianship is the authority given to a person to do something legal as a representative for the benefit and on behalf of a child who does not have both parents or parents who are still alive but not capable of doing legal acts. So if a child has parents who are not capable of legal acts, then a guardian is appointed through the determination of the court. The judge in making the determination must contain the reasons and legal basis of his consideration carefully, so as not to occur errors that cause the determination is not enough consideration.

The purpose of this study is: 1) To explain the consideration of the judge who granted the determination of the Mukomuko Religious Court with the number: 39/Pdt.P/2019/PA. Mkm custody of extramarital children due to the mother's mental retardation. 2) To analyze the determination of the Mukomuko Religious Court with the number 39/Pdt.P/2019/PA. Mkm in the perspective of the Child Protection Act.

This research is normative legal research that uses library study or library research. The approach used is the statutory approach (statute approach) and the case approach.

From the research that has been done shows that the results of the study: 1) In the case at the Mukomuko Religious Court number 39/Pdt.P/2019/PA. Mkm hakim only uses two legal basis in his consideration, namely article 379 of the Civil Code and article 51 paragraph (2) of the marriage law. But in Government Regulation no. 29 in 2019 on the terms and procedures of the appointment of guardians there are conditions that are not met in the application that should be attached because it will be a consideration in the determination of guardians. 2) Determination number 39/Pdt.P/2019/PA. Mkm if seen from the perspective of child protection law related to the status of child guardianship if the child is married before the age of 18 years does not result in the end of guardianship, changes occur only in the child has been classified as a legal person so that it can do legal acts. However, the rights and obligations of a guardian to the child still exist.

ملخص البحث

منيب، إبراهيم 17210080 ، ، ٢٠٢١. وصاية الأطفال خارج إطار الزواج بسبب الأمهات اللاتي يعانين من التخلف العقلي (تقرير دراسة المحكمة الدينية في موكوموكو رقم: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولنا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: سيتي زولاينجة

الكلمات الرئيسية: الوصاية، الطفل خارج نطاق الزواج، التأخر العقلي، قرار.

والوصاية هي السلطة الممنوحة للشخص للقيام بشيء قانوني بلووصاية للمنفعة وبالنيابة عن طفل ما للدين أو والدين لا يزالان على قيد الحياة ولكنهما غير قادرين على القيام بأعمال قانونية. فإذا كان للطفل والدين غير قادرين على القيام بأعمال قانونية، يعين ولي الأمر من خلال بقرار المحكمة. ويجب أن يتضمن القاضي عند اتخاذ القرار الأسباب والأساس القانوني للنظر فيه بعناية، حتى لا تحدث أخطاء تسبب القرار ولا يكفي النظر فيها.

الغرض من هذه البحث هو: (1) شرح نظر القاضي الذي منح بقرار محكمة الدينية موكوموكو برقم: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm لوصاية الأطفال خارج نطاق الزواج بسبب التأخر العقلي للأمها. (2) لتحليل قرار محكمة الدينية موكوموكو برقم 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm في منظور قانون حماية الطفل.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم دراسة المكتبة. والنهج المستخدم هو النهج القانوني ونهج القضية الأساسي. البحث الذي تم في وقت القيام به يظهر أن نتائج يعني: (1) باهاده القضية في المحكمة الدينية موكوموكو رقم 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm القاضي يستخدم أساسين قانونيين في نظره، وهما المدة 379 من القانون المدني والمادة 51 فقرة (2) من قانون الزواج. ولكن في اللائحة الحكومية رقم 29 في 2019 بشأن شروط وإجراءات تعيين الأوصياء هناك شروط لا يتم في الطلب الذي يجب إرفاقه لأنه سيكون اعتبارا في تحديد الأوصياء. (2) تحديد رقم 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm وإذا نظر من منظور قانون حماية الطفل المتعلق بوضع وصاية الطفل إذا كان الطفل متزوجا قبل سن 18 عاما لا يؤدي إلى نهاية الوصاية، تغييرات في الطفل الذي تم أحكم. غير أن حقوق وواجبات الوصي على الطفل لا تزال قائمة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pernikahan berkeinginan untuk memiliki anak yang kemudian sebagai orangtua harus merawat anak mereka. Memelihara baik jiwa dan raga serta harta dari anak merupakan kewajiban bagi orang tua, termasuk juga pada akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 bahwa hubungan orangtua dan anak memiliki akibat hukum berupa kewajiban orang tua dalam bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai mandiri dan terus berlangsung walau terjadi perceraian.¹ Oleh karena itu, setiap orangtua harus mendidik dan memelihara anak mereka hingga dewasa.

Setiap anak membutuhkan orang lain sebagai penjaga dan pemelihara baik terhadap dirinya maupun harta yang dimilikinya, seorang anak membutuhkan orang sebagai pendidik. Seorang anak yang belum dewasa dan masih dalam kekuasaan orangtua atau orang

¹ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan

lain, mereka tak cakap hukum sehingga mereka tidak bisa melakukan suatu perbuatan hukum seperti suatu perjanjian dan lain sebagainya.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.² Dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 50 ayat (1) mengatakan anak yang belum berusia 18 tahun ia berada dibawah kekuasaan wali, dan pada Pasal 51 ayat (2) menjelaskan bahwa wali sebisanya merupakan bagian keluarga dari anak, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.³ Pada dasarnya ada beberapa sebab terjadinya perwalian pada anak:

1. Anak sah dari orangtua, tetapi hak kuasa mereka sebagai orangtua telah dicabut,
2. Anak sah, tetapi orangtuanya sudah cerai,
3. Anak yang lahir luar kawin.⁴

Anak luar nikah atau kawin adalah anak yang merupakan hasil dari hubungan luar kawin. Luar kawin memiliki arti hubungan antara pria dan wanita yang melahirkan keturunan tetapi hubungan tersebut

2 Pasal 1 huruf (h) *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 10.

3 Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan

4 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 1989), 52-53.

tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama masing-masing.⁵ Dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan orangtua ibunya.

Dalam KUH Perdata pada pasal 379 terdapat pengecualian dalam perwalian, yaitu:

1. Wali yang sakit ingatan.
2. Wali yang belum dewasa.
3. Wali yang berda di bawah pengampuan.
4. Wali yang telah dipecat kekuasaannya dalam penetapan hakim sebagai orang tua atau wali.
5. Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru sita dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak-anak tiri mereka sendiri.

Hakim memiliki tanggung jawab terhadap penetapan dan putusan yang dibuatnya karena hakim bertugas memeriksa dan memutus perkara. Penetapan dan putusan tersebut juga harus berisikan pertimbangan hukum hakim yang didasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁶ Sehingga penetapan dan putusan hakim itu harus memperhatikan pertimbangan hukumnya agar setiap

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 80.

⁶ Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

orang bisa menilai apakah putusan atau penetapan tersebut objektif atau tidak.

Hakim bertugas dalam memutuskan suatu perkara harus berupaya pada kebenaran. Kebenaran disini adalah kebenaran relatif, maksudnya adalah kebenaran yang seling berkaitan dengan pihak yang berperkara.⁷ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berdasarkan peraturan saja, melainkan fakta atau peristiwa yang terjadi harus dipertimbangkan.

Masalah perwalian merupakan salah satu perkara dalam Pengadilan Agama (PA) yaitu dibidang perkawinan. PA Mukomuko berlokasi di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dimana itu adalah tempat peneliti melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada semester 7. PA Mukomuko merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang terhadap perkara perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Salah satunya yaitu perkara Nomor: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm adalah perkara permohonan penunjukan wali di PA Mukomuko.

Dalam hukum perdata, perwalian disebabkan anak yang belum dewasa. Belum dewasa dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang

⁷ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negerii*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), 13.

Hukum Perdata yaitu bagi mereka yang belum mencapai 21 tahun atau yang belum pernah menikah.

Dalam kasus ini, orang tua yang seharusnya menjadi wali dari anak termasuk ke dalam salah satu orang yang tidak boleh menjadi wali berdasarkan pasal 379 KUH Perdata yaitu orang yang sakit ingatan. Ibu dari anak tersebut merupakan penderita keterbelakangan mental dan juga korban dari “pemeriksaan” oleh oknum yang tidak diketahui. Ini menyebabkan Ibu dari anak tersebut tidak bisa menjadi wali dari anaknya dalam melakukan perbuatan hukum. Sehingga dibutuhkan perwalian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu anak yang belum 18 tahun atau belum pernah menikah yang tidak di bawah kekuasaan orang tua harus berada dalam kekuasaan wali.

Masalah perwalian yang dimaksud disini bukanlah perwalian dalam pernikahan. Perwalian yang dimaksud disini adalah perwalian dimana anak yang merupakan seseorang yang belum cakap hukum sehingga jika akan melakukan perbuatan hukum membutuhkan seorang wali yang akan mewakilinya. Dalam permohonan ini diketahui juga bahwa anak tersebut membutuhkan penunjukan wali dikarenakan ia akan melakukan pengurusan dispensasi nikah yang mana itu adalah suatu perbuatan hukum. Anak tersebut belum cakap

hukum dan juga wali kandunganya juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali karena mengalami keterbelakangan mental.

Permohonan dalam perkara nomor: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm ini dalam penetapan hakim dikabulkan dan menimbulkan akibat hukum anak tersebut kekuasaannya berada dibawah pamannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji penetapan ini dan akan menganalisisnya dengan perspektif Undang-Undang Perlindungan anak.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang mengabulkan penetapan Pengadilan Agama Mukomuko dengan nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm tentang perwalian anak luar nikah akibat ibu mengalami keterbelakangan mental?
2. Bagaimana penetapan Pengadilan Agama Mukomuko dengan nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim yang mengabulkan penetapan Pengadilan Agama Mukomuko dengan nomor: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm perwalian anak luar nikah akibat ibu mengalami keterbelakangan mental.

2. Untuk menganalisis penetapan Pengadilan Agama Mukomuko dengan nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hadirnya penelitian ini bisa memperluas keilmuan khususnya pada bidang hukum dan syari'ah, menjelaskan secara deskriptif penetapan Pengadilan Agama Mukomuko dengan nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm tentang perwalian anak luar nikah akibat ibu mengalami keterbelakangan mental.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian sejenis ini diharapkan dapat terus berkembang pada banyak jenis pendekatan penelitian lain sehingga diharapkan mendapatkan pengetahuan yang lebih komprehensif, terlebih pada pengetahuan penetapan hakim terkait perwalian anak luar nikah dikarenakan wali nya mengalami keterbelakangan mental.

b. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada masyarakat umum tentang ketentuan perwalian anak luar nikah yang walinya mengalami keterbelakangan mental.

E. Definisi Oprasional

1. Perwalian: kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁸ Perwalian yang dimaksud disini bukan wali nikah.
2. Anak luar nikah: anak yang lahir tidak dari pasangan yang memiliki hubungan perkawinan yang sah atau akibat dari hubungan yang tidak sah.⁹
3. Keterbelakangan Mental: suatu keadaan seseorang yang disebabkan rendahnya IQ yang membuat sikap dan perilaku mereka berbeda dengan manusia normal lainnya.¹⁰
4. Penetapan: produk hukum dari permohonan. Permohonan adalah surat permohonan yang berisi tuntutan hak perdata oleh salah

⁸ Pasal 1 huruf (a) *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 10.

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 80.

¹⁰ Nadira Lubis, Hetty Krisnani dan Muhammad Ferdiansyah, "Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa dan Keterbelakangan Mental," *Prosding KS: Riset & PKM*, no 3(2015): 389

seorang pihak yang berkepentingan yang tidak mengandung suatu sengketa.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maksudnya yaitu suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Penelitian ini menggunakan studi pustaka atau *library research* sehingga peneliti tidak perlu terjun langsung kelapangan untuk mencari informasi penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu

11 Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pusaka Setia, 2017), 174.

12 Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XII, (Jakarta: Kencana, 2016), 35.

penelitian yang meneliti dan menelaah alasan hukum apa saja yang dipakai oleh hakim sehingga dapat memutuskan suatu perkara, yang disebut juga dengan *ratio decidendi*.¹³

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif data yang ada berupa data sekunder, karena data dalam penelitian hukum normatif berupa dokumen yang tertulis. Peter mahmud menyebut ini dengan bahan-bahan hukum, bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Penetapan: Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko No:39/Pdt.P/2019/PA.Mkm
- 2) Peraturan perundang-undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

¹³ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

¹⁴ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 121.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman,
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019
Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan
Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah,
penelitian terdahulu, jurnal, dan literatur lain yang
berkaitan dengan penelitian. Diantaranya sebagai berikut:

1. Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam
di Dunia Islam.
2. Akmaluddin Syahpurta, Perwalian Anak Dalam
Bingkai Hukum.
3. R. Soetjono dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan
Keluarga.
4. Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak.
5. Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di
Indonesia.
6. Rusdi Maslim, Diagnosa Gangguan Jiwa, Rujukan
Ringkas Dari PDJ-III.
7. Ishak, Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis
di Indonesia, Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang membantu untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain, kamus Bahasa, kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan pada skripsi ini adalah Kamus Al-Munawir oleh Ahmad Warson Munawwir.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-perundangan, putusan atau penetapan pengadilan dan bahan-bahan hukum lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

5. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing berada pada tahapan yang pertama, disini peneliti akan memilah bahan-bahan hukum primer, sekunder

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 119.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 110.

dan tersier yang sudah dikumpulkan. Kemudian akan memilih serta merangkum bahan hukum mana yang memiliki hubungan dengan penetapan hakim di Pengadilan Agama Mukomuko nomor: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm terkait permohonan perwalian anak luar nikah akibat ibu mengalami keterbelakangan mental.

Selain itu disini juga akan mengkaji dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam mempertimbangkan penetapan Pengadilan Agama Mukomuko nomor: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm yang merupakan bahan hukum primer dari penelitian ini.

b. Classifying

Penulis akan mengelompokkan bahan-bahan yang sudah dipilah sesuai dengan poin yang memiliki kesamaan. Bahan-bahan yang dikelompokkan seperti kajian teori mengenai dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Mukomuko dalam menetapkan perkara nomor: 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm tentang permohonan perwalian anak luar nikah akibat ibu mengalami keterbelakangan mental.

c. Verifying

Penulis akan melakukan pemeriksaan ulang secara telaten terhadap bahan hukum yang sudah dikelompokkan. Pemeriksaan ulang ini penting agar terhindar dari keraguan

dan dalam melakukan penelitian dan hasil dari penelitian sesuai dengan realita serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini penulis akan kembali mengecek bahan-bahan yang telah dikumpulkan dari studi pustaka.

d. Analyzing

Dalam tahap ini peneliti akan melakukan proses pemeriksaan, menelaah berbagai data, kemudian memprosesnya dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan berbagai teori yang telah dipaparkan sehingga menghasilkan data yang bermanfaat dan mudah dipahami.

e. Concluding

Langkah ini merupakan yang terakhir yang berisikan kesimpulan terhadap bahan yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Bahan-bahan tersebut yang sudah lengkap kemudian akan dianalisis. Berisikan tentang uraian singkat terhadap beberapa bab sebelumnya secara ringkas dan juga menjawab rumusan masalah yang ada pada pendahuluan.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan masalah pernikahan wali hakim dilakukan oleh:

Pertama, Karya yang ditulis oleh Siti Mukaromah Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018, yang Judul Penelitiannya berjudul Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Tanggung Jawab Perwalian Anak Yang Lahir dari Ibu di Bawah Umur Akibat Pemerkosaan oleh Ayah Tiri (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya), dalam Penelitiannya ia menyimpulkan bahwa tanggung jawab perwalian anak yang lahir dari Ibu di bawah umur akibat pemerkosaan oleh ayah tiri seharusnya jatuh pada Ibu dari korban pemerkosaan atau nenek dari si bayi akan tetapi beliau menolak menjadi wali karena malu. Dalam hukum Islam seharusnya tanggung jawab perwalian jatuh pada saudara laki-laki dari pihak nenek si bayi, tetapi hubungan kedua keluarga tersebut kurang harmonis. Dalam hukum perdata perwalian anak tersebut jatuh pada ibunya tetapi ibu dalam kasus ini masih berusia dibawah umur. Sehingga demi kemaslahatan sang anak, bibi dari Ibu atau saudara nenek dari bayi diperbolehkan menjadi walinya.¹⁷

Kedua, Karya yang ditulis oleh Siti Fatimah Jurusan Hukum Islam Prodi Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syariah dan Hukum,

17 Siti Mukaromah, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Tanggung Jawab Perwalian Anak yang Lahir dari Ibu di Bawah Umur Akibat Pemerkosaan oleh Ayah Tiri (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)." (Digital Library, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014, yang judul Penelitiannya yang berjudul Analisis hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/PDT.P/2013/PA.MLG Tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur, dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa dalam penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/PDT.P/2013/PA.MLG hakim mengabulkan permohonan pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, yaitu; hakim dilarang menolak dan mengadili perkara yang diajukan ke pengadilan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat dan kepastian hukum. Dalam analisis menggunakan hukum Islam penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/PDT.P/2013/PA.MLG memberi kepastian hukum dan juga manfaat bagi pemohon.¹⁸

Ketiga, Karya yang ditulis oleh Lutvi Naili Awanah Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syahksiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015, yang judul penelitiannya Permohonan Perwalian oleh Ibu Kandung Atas Anaknya Untuk Melakukan Transaksi Penjualan Tanah Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Peneliti memberikan kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Madiun

18 Siti Fatimah, “Analisis hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/PDT.P/2013/PA.MLG Tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur” (Digital Library, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014).

menerima permohonan perwalian oleh Ibu kandung terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Kehakiman yang mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara selama masih sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama Madiun. Permohonan yang diajukan oleh ibu itu bertujuan untuk kepentingan anak dan memberi perlindungan kepada orangtua yang mewakili anaknya apabila terjadi sengketa nantinya. Dasar dari pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan penetapan ibu sebagai wali terhadap anak di bawah umur yaitu transaksi yang dilakukan tersebut demi kepentingan anak yaitu biaya hidup anak, serta Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang perlu dilindungi dari anak yaitu hak-haknya.¹⁹

Keempat karya yang ditulis oleh Zainur Ratna Savitri mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2018 dengan judul skripsinya yaitu Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dengan Retardasi Mental Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg). Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam pemeriksaan persidangan pada putusan yang dianalisis dalam skripsinya ini belum terdapat perlindungan hukum terhadap korban, dimana tidak adanya pemeriksaan psikologis agar tahu

19 Lutfi Nailil Awanah, "Permohonan Perwalian Oleh Ibu Kandung Atas Anaknya Untuk Melakukan Transaksi Penjualan Tanah Waris" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

bagaimana kesiapan mental korban untuk ikut bersidang. Juga keterangan korban juga dianggap hakim tidak relevan dengan keterangan dari saksi dan kejadian sebenarnya, hakim memberikan sanksi pidana kepada pelaku sehingga penulis skripsi ini menganggap bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum cukup karena korban adalah penderita retardasi mental, korban mengalami trauma akibat tindak asusila pemerkosaan oleh terdawa yang mana ini juga meresahkan masyarakat.²⁰

Tabel 1. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Mukaromah	Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Tanggung Jawab Perwalian Anak Yang Lahir dari Ibu di Bawah Umur Akibat Pemerkosaan oleh Ayah Tiri (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan	Membahas tentang perwalian anak yang lahir akibat pemerkosaan	Jenis penelitian dan konsep teori yang digunakan untuk menganalisis kasus.

²⁰ Zainur Ratna Savitri, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dengan Retardasi Mental sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Putusan Nomor 244/Pid.B/2013/PT.Smg)” (Digital Repository, Universitas Jember, 2018).

		Wonocolo Kota Surabaya)		
2	Siti Fatimah	Analisis hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/PDT.P/2013/P A.MLG Tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur	Menganalisis penetapan tentang pengajuan perwalian anak	Konsep teori yang digunakan untuk menganalisis kasus
3	Lutfi Naili Awanah	Permohonan Perwalian oleh Ibu Kandung Atas Anaknya Untuk Melakukan Transaksi Penjualan Tanah Waris di Pengadilan Agama Madiun	Membahas perwalian terhadap anak	Jenis penelitian skripsi ini empiris atau lapangan
4	Zainur Ratna Savitri	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dengan Retardasi Mental Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Putusan Nomor	Menganalisis dengan produk hukum pengadilan, tentang orang pengidap retardasi mental yang merupakan	Konsep yang digunakan untuk menganalisis berupa asas-asas hukum

		244/Pid.B/2013/P T.Smg)	korban pemeriksaan	
--	--	----------------------------	-----------------------	--

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman tentang apa saja yang ada di dalam skripsi secara sistematis dan menyeluruh. Skripsi ini terdiri atas IV bab, yang mana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisi pendahuluan berupa gambaran umum yang dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

BAB II: Membahas tinjauan pustaka berisikan tentang penjelasan terhadap konsep teori yang terdapat dalam masalah penelitian. Diawali dengan penjelasan terkait perwalian, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan anak luar nikah.

BAB III: Berisi pembahasan penelitian yang merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis bahan-bahan yang sudah dikumpulkan. Pada bab ini merupakan bagian untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada.

BAB IV: BAB terakhir tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perwalian

Perwalian berasal dari kata wali yang artinya menolong dengan rasa cinta.²¹ Wali berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamaknya yaitu *awliya* yang artinya teman, klien, sanak atau pelindung. Selain itu dalam fiqh Islam perwalian disebut *al-walayah (alwilayah)* yang dalam konteks perwalian ini berarti orang yang mengurus atau menguasai sesuatu.²² Beralih dari pengertian secara bahasa terkait wali, wali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 pasal 1 (1) adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Di dalam KUHPdata pasal 330 ayat (3) menyatakan bahwa berada di bawah perwalian bagi mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Kemudian dalam pasal 331 KUHPdata menyatakan hanya boleh satu orang wali disetiap perwalian.²³ Anak yang berada di bawah perwalian yaitu:

21 Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir*, (Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), 1960.

22 Muhammad Amin Summa, *hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135.

23 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 99-100.

- a. Anak sah yang kekuasaan kedua orang tuanya telah dicabut sebagai orang tua.
- b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
- c. Anak sah yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- d. Anak luar nikah.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²⁵

Menurut Ali Afandi perwalian adalah pengawasan terhadap diri dan pengurusan harta kekayaan terhadap seorang anak yang jika tidak di bawah kekuasaan orang tua dan anak tersebut belum dewasa, yaitu jika orang tua anak bercerai atau salah satu atau semua dari orang tua anak meninggal.²⁶

24 Akmaluddin Syahpurta, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014), 80.

25 Pasal 1 huruf (h) *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 10.

26 Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 156.

Menurut Subekti perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, tidak di bawah kekuasaan orang tua serta pengawasan benda atau kekayaan anak yang diatur dalam undang-undang.²⁷

Abdulkadir Muhammad mengatakan pengertian perwalian adalah pengawasan serta pengurusan diri dan harta benda anak belum dewasa yang merupakan kewajiban hukum yang dibebankan kepada wali.²⁸

Dalam Islam, Dedi Junaedi menyebut bahwa perwalian ada dua kategori yaitu perwalian umum yang berupa beban memelihara kepentingan Bersama yang diemban oleh pemimpin (waliyul amri), dan perwalian khusus yaitu perwalian terhadap jiwa dan harta anak.²⁹

Menurut Amin Summa di dalam bukunya perwalian adalah otoritas atau kekuasaan yang dimiliki seseorang yang mengizinkan untuk dengan langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa perlu adanya izin dari orang lain.³⁰

Oleh karena itu, perwalian ini pada dasarnya adalah pemeliharaan terhadap orang yang sudah diatur berdasarkan Undang-undang dan juga pengurusan harta benda anak yang belum dewasa (*pupil*).³¹ Perwalian

27 Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata...*, 52.

28 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2000), 98.

29 Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Cet ke-1, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2000), 104.

30 Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Islam...*, 134.

31 Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 150.

merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang agar bisa melakukan perbuatan hukum demi kepentingan sebagai wakil dari anak yang salah satu atau kedua orang tua anak telah meninggal, telah bercerai, atau tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

B. Tinjauan Hukum Perwalian

1. Perwalian dalam KUH Perdata

Perwalian adalah pengurusan terhadap anak yang belum dewasa yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepada orang yang diberi kewenangan sebagai wakil dalam melakukan perbuatan hukum. Pasal 330 ayat (3) bahwa “mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Dalam KUH Perdata ketentuan terkait perwalian tertera pada pasal 330-418. Kemudian pasal 331 KUH Perdata menyatakan hanya boleh satu orang wali disetiap perwalian.³²

Tugas dari seorang wali dalam pasal 383 yaitu setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak yang belum

32 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, 99-100.

dewasa sesuai dengan harta kekayaannya. Selain itu wali juga harus mewakili anak tersebut dalam segala tindak perdata.

a. Sebab Terjadinya Perwalian

Anak yang berada di bawah perwalian dikarenakan beberapa sebab yaitu:

- 1) Anak sah yang kekuasaan kedua orang tuanya telah dicabut sebagai orang tua.
- 2) Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
- 3) Anak sah yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- 4) Anak luar nikah.³³

Titik Triwulan Tutik dalam bukunya menyebutkan bahwa anak yang berada dibawah perwalian adalah anak yang belum dewasa dan salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau telah bercerai atau anak yang lahir di luar kawin.³⁴

KUH Perdata memfokuskan permasalahan perwalian pada anak yang belum dewasa. Ini tertera dalam pasal 330 yaitu anak yang belum dewasa berada di bawah perwalian. Kemudian pasal ini menjelaskan juga bahwa anak yang belum dewasa adalah yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin, apabila belum 21 tahun

³³ Akmaluddin Syahpurta, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum...*, 80.

³⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006), 91.

tetapi perkawinannya dibubarkan maka anak tersebut kembali menjadi belum dewasa.

Menurut BW dan undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya dibawah 21 tahun dan belum menikah.³⁵

· Menurut konvensi hak anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun (kecuali apabila kedewasaan anak telah ditentukan lebih awal), atau dibawah 18 tahun tetapi sudah menikah.

Menurut undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang termasuk dalam criteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun.

Kedewasaan juga dapat diketahui pada orang yang melakukan suatu perkawinan. Pada BW pasal 29 menyebutkan bahwa seorang pria yang akan menikah jika sudah mencapai usia 18 tahun dan seorang wanita pada usia 15 tahun, apabila belum mencapai usia yang telah ditentukan tersebut maka tidak boleh melakukan perkawinan.

Dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) bahwa jika ingin melaksanakan perkawinan tetapi

35 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, 8.

belum genap berusia 21 tahun maka harus mendapat izin dari orang tua. Kemudian pasal 7 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa bagi mereka yang akan melakukan perkawinan baik pria maupun wanita hanya diizinkan Ketika sudah berusia 19 tahun. Apabila ingin tetap melakukan perkawinan tetapi belum mencapai 19 tahun harus melakukan dispensasi perkawinan lewat penetapan pengadilan.

Menurut Ali Afandi membagi kedewasaan menjadi dua unsur penting, yaitu belum mencapai usia 21 tahun dan belum melakukan perkawinan.³⁶ Selain dari batasan umur, Vollmar mengatakan bahwa terdapat batas khusus dengan suatu pribadi di dalam yang sudah dan yang belum dewasa jika dahulu kedewasaan orang adalah 23 tahun dengan Undang-Undang Anak tahun 1901 sebagaimana disebutkan dalam nomor terdahulu, batasnya diturunkan menjadi 21 tahun. Orang dapat memperoleh kedudukan sebagai orang dewasa lebih awal dengan surat-surat pernyataan sudah dewasa, suatu kedewasaan akan segera ada dikarenakan terjadinya suatu perkawinan.³⁷

³⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian...*, 153.

³⁷ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata...*, 137.

Demikian pada dasarnya KUH Perdata dalam pasal 330 menyatakan bahwa batas usia dewasa itu adalah 21 tahun. Akan tetapi orang juga dibilang dewasa jika ia sudah melakukan perkawinan meskipun belum berusia 21 tahun. Syarat usia menikah dalam Undang-undang Perkawinan terbaru mengatakan yaitu 19 tahun, baik pria maupun wanita.

b. Macam-Macam Perwalian

Menurut Ali Syahputra di bukunya disebutkan perwalian pada KUH Perdata terdapat 6 macam :

1) Perwalian demi hukum.

Perwalian yang terjadi ketika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia dan yang menjadi wali bagi anak tersebut demi hukum adalah orangtua yang hidup lebih lama.³⁸ Ini sesuai dengan pasal 345 KUH Perdata:

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibabaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.”

Akan tetapi pasal tersebut tidak menjelaskan terkait pengecualian apabila suami istri yang hidup terpisah karena perceraian atau pisah ranjang. Sehingga jika walaupun

38 Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia...*, 91.

sudah bercerai jika salah satu dari mantan pasangan ada yang meninggal maka dengan sendirinya demi hukum yang hidup terlama menjadi wali atas anak.

2) Wali berdasarkan ketetapan pengadilan.

Perwalian ini terjadi dikarenakan kedua orang tua anak yang belum dewasa meninggal dunia, atau juga dikarenakan pemecatan terhadap orang tua. Oleh karena itu, hakim menunjuk wali dengan ketetapannya di pengadilan untuk anak tersebut. Terdapat pada KUH Perdata pasal 359:

“Semua minderjarige yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh pengadilan.”

3) Wali berdasarkan surat wasiat.

Pasal 355 menyebutkan bahwa setiap orang tua yang menjadi wali bagi anaknya atau lebih berhak menyiapkan wasiat menunjukan wali pengganti jika sekiranya akan meninggal.³⁹ Berikut bunyi pasal 355:

“Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain.”

³⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian...*, 157.

Calon wali yang ditunjuk boleh lebih dari satu yang diurutkan dengan nomor jika sekiranya orang yang tersebut sebagai wali tidak ada. Wasiat ini juga bisa dalam bentuk akta ke notariatan.

4) Kawan wali.

Kawan wali adalah jika ibu yang merupakan seorang wali dan melakukan perkawinan lagi maka suami barunya akan ikut serta menjadi kawan wali dari ibu. Kawan wali ini akan berlanjut sampai terjadi perceraian. Ini disebutkan dalam pasal 351 KUH Perdata:

“Bila wali ibu kawin, maka suaminya, kecuali jika ia dikecualikan atau dipecat dari perwalian, selama dalam perkawinan antara suami dan isteri tidak ada pisah meja dan ranjang atau tidak ada pisah harta benda, demi hukum menjadi wali peserta dan di samping isterinya bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perwalian peserta suami berakhir, bila ia dipecat dari perwalian atau si ibu berhenti menjadi wali.”

5) Wali soma (*Gezinj Voogd*).

Wali soma timbul akibat dari pemecatan atau pencabutan dari kekuasaan orang tua tetapi si anak masih terlalu kecil dan belum memungkinkan jika harus dipisahkan dari orang tua. Sehingga muncul yang namanya wali soma ini untuk mengawasi anak yang masih tinggal dengan orang tua yang sudah dipecat kekuasaannya itu.

6) Wali pengawas (*Weeskamer*).

Perwalian yang menjadi pengawas terhadap harta peninggalan yang dimiliki anak dari walinya. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan terhadap harta anak. Wali pengawas adalah Badah Harta Peninggalan.⁴⁰

c. Asas dalam Perwalian

Perwalian dalam KUH Perdata memuat beberapa asas, yaitu sebagai berikut:

1) Asas tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaaraeid*)

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali (pasal 331 KUH Perdata). Asas tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaaraeid*). Asas ini mempunyai pengecualian dalam dua hal:

- a) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langslevende*) maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi wali serta atau wali peserta (*medevoogd*) berdasarkan pasal 351 KUH Perdata.
- b) Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang *minderjarije* diluar Indonesia berdasar pasal 361 KUH Perdata.

⁴⁰ Akmaluddin Syahpurta, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum...*, 84-86.

2) Asas persetujuan keluarga

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada, maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu.⁴¹

d. Syarat Menjadi Wali

Syarat-syarat menjadi wali tidak diterangkan secara eksplisit pada KUH Perdata. Tetapi pada pasal 379 KUH Perdata menyebutkan bahwa terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi wali, sebagai berikut:

- 1) Pejabat-pejabat pengadilan
- 2) Orang yang sakit ingatan
- 3) Orang yang belum dewasa
- 4) Orang yang dibawah pengampuan
- 5) Orang yang telah dicabut kekuasaan sebagai orang tua perwalian
- 6) Para anggota pimpinan Balai Peninggalan Harta.

Seseorang juga dapat dipecat dari hak perwaliannya, menurut Lili Rasjidi menyebutkan beberapa alasan hak perwalian seseorang dipecat dalam bukunya, yaitu:

- 1) Berperilaku buruk

⁴¹ R. Soetjono dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet ke-4, (Bandung: Alimni, 1972), 188.

- 2) Lalai dari kewajiban, tidak telaten, menyalahgunakan wewenang
- 3) Sebab dipecat dari kekuasaan perwaliannya sebagai orang tua berdasarkan pertimbangan hakim demi kepentingan anak
- 4) Wali dalam keadaan pailit
- 5) Mengajukan perkara kepada pengadilan terhadap anak di bawah umur yang mengancam kedudukan anak dan harta bendanya
- 6) Terkena hukuman dalam melakukan kejahatan terhadap anak dalam kekuasaannya
- 7) Menerima hukuman akibat melakukan kejahatan yang terdapat dalam bab XIII, XIV, XV, XIX dan XX buku kedua KUH Pidana, yang dilakukan kepada anak belum dewasa yang berada dalam kekuasaannya
- 8) Mendapat hukuman badan berdasarkan putusan yang sudah mutlak selama 2 tahun atau lebih.⁴²

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dapat menjadi seorang wali jika tidak memiliki kriteria yang sudah tertera di atas.

e. Kewajiban dalam Perwalian

⁴² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 150.

Dalam pasal 328 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa anak dalam perwalian juga memiliki kewajiban terhadap orang yang menjadi walinya yaitu dengan menghormatinya.⁴³

Wali memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya. Terkait hal ini telah disebutkan dalam KUH Perdata pasal 383 sampai dengan pasal 408, yang dirangkum menjadi poin singkat sebagai berikut :

- 1) Memelihara dan mendidik anak yang berada dalam perwaliannya.
- 2) Mewakilkkan anak terhadap semua tindak perdata.
- 3) Memohon pada pengadilan agar memasukkan anak pada Lembaga Pendidikan negara jika kelakuan anak tidak terkendali.
- 4) Mengurus dengan telaten terhadap semua harta benda yang dimiliki anak dan juga memiliki kewajiban jika terdapat kerugian akibat kelalaiannya.
- 5) Tidak boleh meminjam uang, melakukan pengasingan terhadap barang milik anak tanpa seizin Pengadilan Negeri. Jika diizinkan maka harus dilakukan secara lelang.

⁴³ Ishak, "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 3(2017): 582

- 6) Setiap akhir perwalian harus membuat perhitungan tanggung jawab penutup dal lain-lain.⁴⁴

f. Pengangkatan Perwalian

Perwalian diperlukan agar seorang anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua atau berada di bawah perwalian yang tidak diatur secara sah. Sehingga anak harus ditunjuk seorang wali sebagai seseorang yang mewakili tindak perdatanya oleh Pengadilan Negeri, sesudah memanggil atau mendengar secara sah dari keluarga sedara atau semenda.

Pengangkatan perwalian ini dikarenakan orang tua yang tidak diketahui keberadaannya, atau karena orang tua anak meninggal sehingga perwaliannya tidak ada. Oleh karena itu, Pengadilan melakukan pengangkatan seseorang untuk menjadi wali.⁴⁵

Pengangkatan perwalian secara garis besar terdapat dua macam, yaitu:

1) Perwalian oleh undang-undang

Dalam undang-undang ketentuan terhadap perwalian dipisahkan antara anak yang sah dan anak luar kawin. Anak yang sah jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka yang akan berhak menjadi wali adalah orang tua

⁴⁴ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia...*, 150-151.

⁴⁵ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 31.

yang hidup terlama. Kecuali orang tua tersebut sudah dicabut kekuasaan perwalian terhadap anaknya. Perwalian atas anak diluar kawin adalah kepada ibunya.⁴⁶

2) Perwalian dengan surat wasiat

Terdapat beberapa syarat dalam perwalian dengan surat wasiat:

- a) Pengangkatan wali dengan surat wasiat harus dilakukan oleh orang tua yang saat itu merupakan wali yang memegang kekuasaan terhadap anaknya.
- b) Jika telah meninggal, perwaliannya tidak berpindah karena hukum atau ketetapan hakim kepada orang tua lain.
- c) Orang melakukan pengangkatan itu Ketika waktu kematiannya memang mempunyai kekuasaan sebagai orang tua atau perwalian.
- d) Pengangkata wali dengan surat wasiat itu harus tanpa ada paksaan.⁴⁷

Perwalian terhadap seseorang diangkat oleh hakim dan perwaliannya akan dimulai semenjak pengangkatan jika orang tersebut menghadiri pengangkatan tersebut. Jika tidak hadir

⁴⁶ Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 153.

⁴⁷ Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata...*, 154.

perwalian akan dimulai semenjak pengumuman sudah sampai kepadanya. Jika wali itu diangkat oleh orang tua maka perwalian akan dimulai jika orang tua tersebut sudah meninggal dunia dan wali yang ditunjuk menerima pengangkatan tersebut, ini tercantum dalam pasal 331 KUH Perdata. Selain itu dalam pasal 362 KUH Perdata seorang wali harus bersumpah dimuka Balai Harta Peninggalan⁴⁸

g. Berakhirnya Perwalian

Perwalian dapat berakhir dengan ditinjau dari dua keadaan, yaitu:

- 1) Terkait dengan kondisi anak, perwalian dapat berakhir dikarenakan:
 - a) Anak telah dewasa
 - b) Anak meninggal dunia
 - c) Kembalinya kekuasaan orang tua yang dulu dicabut
 - d) Anak luar kawin yang belum dewasa yang kemudian disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan anak tersebut menjadi sah.
- 2) Terkait dengan wali, perwalian akan berakhir jika:
 - a) Terjadi pemecatan atau pembebasan diri dari wali

⁴⁸ Akmaluddin Syahpurta, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum...*, 84.

- b) Terdapat alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian yang harus lebih mementingkan kepentingan anak.⁴⁹

Seorang wali dapat meminta agar dirinya dibebaskan dari kekuasaannya sebagai wali dengan alasan, sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang dikarenakan kepentingan negara harus keluar negeri.
- 2) Seorang tentara yang sedang dalam dinas aktif.
- 3) Orang yang berusia 60 tahun keatas.
- 4) Seseorang yang sudah menaungi kekuasaan wali terhadap lebih dari lima orang anak lain.
- 5) Seseorang yang sudah mempunyai anak sah lima atau lebih.

2. Perwalian dalam Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 50 mengatakan anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan atau yang sedang tidak dalam kekuasaan orang tua, ia berada dibawah kekuasaan wali. Perwalian itu terhadap diri dan harta anak yang bersangkutan. Pada Pasal 51 ayat (2) menjelaskan bahwa wali sebisanya merupakan bagian keluarga dari anak, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

⁴⁹ Akmaluddin Syahpurta, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum...*, 87.

a. Syarat Perwalian

Syarat anak yang memperoleh perwalian terdapat dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu:

- 1) Pria atau perempuan yang berusia di bawah 18 tahun.
- 2) Belum kawin.
- 3) Tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.
- 4) Tidak berada dibawah kekuasaan wali.
- 5) Perwalian terhadap pemeliharaan anak dan harta benda anak tersebut.

Sedangkan syarat menjadi wali dalam undang-undang perkawinan terdapat pada pasal 51 ayat (2), yaitu:

- 1) Sudah dewasa.
- 2) Berakal.
- 3) Jujur
- 4) Memiliki niat yang baik untuk menjadu baik.⁵⁰

b. Kewajiban Wali

Kewajiban wali di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pada pasal 51 dan 52, yakni seorang wali wajib:

⁵⁰ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia...*, 144.

- 1) Melakukan pengurusan terhadap anak yang berada di bawah kekuasaannya sebaik mungkin termasuk pada harta bendanya, juga tetap menghormati agama dan kepercayaan anak.
- 2) Terhadap harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, harus dibuat daftar semenja pengangkatan ia menjadi wali termasuk terhadap perubahan harta anak tersebut selama ia menjadi wali.
- 3) Memiliki tanggung jawab terhadap harta benda anak di bawah kekuasaannya termasuk jika ada kerugian yang diakibatkan kelalaiannya.
- 4) Dilarang memindah tangankan atau menggadai harta benda anak di bawah kekuasaannya yang berupa barang tetap, tetapi jika itu dilakukan demi kepentingan anak.⁵¹

c. Berakhirnya Perwalian

Secara garis besar pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perwalian berakhir, yakni:

- 1) Anak sudah dewasa.
- 2) Anak meninggal dunia.

⁵¹ Akmaluddin Syahpurta, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum...*, 89.

- 3) Wali meninggal dunia.
- 4) Wali dipecat dari perwaliannya.

Perwalian berakhir bisa juga karena kekuasaan orang tua atau wali dicabut atau dipecat. Pemecatan kekuasaan seorang wali ini dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Pasal 49 menyatakan bahwa orang tua baik itu salah satu atau keduanya dapat dicabut dari perwaliannya atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwanang dengan putusan pengadilan. Pencabutan itu dikarenakan lalai dari kewajibannya sebagai wali dan berkelakuan buruk. Tetapi pencabutan ini tidak menghapus kewajiban dalam membiayai pemeliharaan anak itu.⁵²
- 2) Jika wali melakukan perbuatan yang berakibat kerugian terhadap harta kekayaan anak yang berada di bawah kekuasaannya, menurut pasal 54 undang-undang perkawinan ia harus mengganti rugi jika ada tuntutan dari anak atau keluarganya.⁵³

52 K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 35.

53 Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 30.

3. Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁵⁴

a. Syarat Perwalian

Dalam pasal 107 KHI, bagi anak yang belum dewasa yaitu usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan maka anak tersebut baik pribadi, harta kekayaan dan dalam setiap perbuatan hukumnya akan diwakilkan oleh orang tua. Jika orang tuanya sekiranya tidak mampu atau lalai maka Pengadilan Agama akan menunjuk kerabat terdekat yang mampu melakukan kewajiban tersebut.

Syarat bagi seseorang yang akan diangkat menjadi wali dalam KHI yaitu:

- 1) Orang dewasa atau badan hukum, sebisanya merupakan kerabat anak
- 2) Berpikiran sehat
- 3) Adil

⁵⁴ Pasal 1 huruf (h) *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 10.

4) Jujur

5) Berkelakuan baik

b. Sebab Terjadinya Perwalian

Sebab terjadinya perwalian terdapat dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) serta pasal 108 KHI, yaitu:

- 1) Kerabat boleh mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk menunjuk dirinya menjadi wali, jika wali atau orang tua anak tidak mampu atau lalai dalam kewajibannya sebagai wali.
- 2) Perwalian juga bisa dipindahkan dengan wasiat dari orang tua kepada seseorang atau badan hukum terhadap diri dan harta kekayaan anak-anaknya jika orang tua tersebut meninggal dunia.⁵⁵

c. Kewajiban Wali

Terkait kewajiban yang harus diemban oleh seorang wali terdapat dalam pasal 110 dan 111, yaitu:

- 1) Wajib memelihara diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya dengan semaksimal mungkin, serta wajib membimbing di jalan agama, Pendidikan dan keterampilan yang sekiranya membantu masa depan anak.

⁵⁵ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 31

- 2) Harta kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya juga tanggung jawab wali, jika terjadi kerugian akibat kelalaiannya maka wali harus mengganti atas kerugian tersebut.
- 3) Dalam tanggung jawab terhadap harta benda anak yang di bawah perwaliannya, wali harus membuat daftar harta benda anak beserta perubahannya dimulai dari awal diangkat menjadi wali hingga berakhir. Ini dibuktikan dengan pembukuan yang sekali setahun ditutup.
- 4) Jika perwalian telah berakhir maka wali berharap menyerahkan semua harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya itu.⁵⁶

d. Berakhirnya Perwalian

Dalam KHI terdapat beberapa hal yang dapat membuat perwalian itu berakhir, yaitu:

- 1) Pasal 111 ayat (1) menyebutkan bahwa perwalian berakhir ketika anak yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah.
- 2) Pasal 109 menyebutkan bahwa perwalian juga berakhir ketika hak perwalian seseorang dicabut oleh Pengadilan Agama jika wali tersebut pemabuk penjudi, pemboros,

⁵⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 264.

gila, lalai dan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya. Perwalian akan dialihkan kepada kerabat anak yang membuat permohonan kepada Pengadilan Agama.⁵⁷

Pengadilan Agama dapat melakukan pencabutan kekuasaan perwalian seseorang karena permohonan dari kerabat anak yang berada di bawah perwaliannya, disebabkan:

- 1) Memelihara anak yang di bawah perwaliannya dengan tidak sungguh-sungguh.
- 2) Tidak memberikan Pendidikan dan bimbingan agama kepada anak di bawah perwaliannya.
- 3) Menyalahgunakan harta kekayaan anak yang di bawah perwaliannya yang mengakibatkan kerugian pada si anak.
- 4) Wali berperilaku buruk yang ditakutkan akan dicontoh oleh anak yang berada di bawah perwaliannya.
- 5) Segala Tindakan lain yang sekiranya akan merugikan anak yang di bawah perwaliannya.⁵⁸

4. Perwalian dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵⁷ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional...*, 33.

⁵⁸ Erban Hari Nugroho, "Analisis Hukum Islam terhadap Perwalian Anak Oleh Ibu Tiri (Studi Kasus Penetapan PA Tuban dalam Perkara No. 003/Pdt.P/2006/PA. Tuban)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), <http://digilib.uinsby.ac.id/>

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun dan juga belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penetapan usia itu mengikuti hasil dari diselenggaranya *Convention on the Rights of the Childs* (CRC) oleh Majelis PBB 20 November 1990 yang berlokasi di New York.⁵⁹

Perwalian dalam undang-undang ini disebabkan jika kedua orang tua anak meninggal dunia, tidak mampu mengurus anak, atau sebab lain yang mengakibatkan orang tua anak tidak bisa menjalankan kewajibannya mengurus anak, maka bisa diangkat orang lain atau wali. Seseorang yang menjadi wali anak harus menjalankan kewajibannya sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas anak. Selain orang tua atau wali, yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak adalah pemerintah, negara, keluarga anak, dan masyarakat.⁶⁰

Dalam pasal 59 menyebutkan bahwa anak boleh meminta untuk dipisahkan dari orang tua dengan alasan yang dapat diterima oleh hukum. Jika orang tua atau wali melakukan penganiyaan, perlakuan buruk, dan hal buruk lainnya yang merugikan anak maka wali tersebut harus dikenakan hukuman.

59 Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no. 2(2016): 251

60 Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 5.

5. Perwalian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdapat beberapa ketentuan terkait perwalian. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Pada ayat (2) menjelaskan pengertian wali, yaitu seseorang atau badan yang sah dengan kenyataannya melaksanakan kekuasaan untuk mengasuh anak seperti orang tua.

Penunjukan kepada wali dalam pasal 35 ayat (1) disebabkan karena orang tua dan keluarga anak diketahui keberadaannya atau tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai penanggung jawab anak dikarenakan alasan tertentu. Sehingga dilakukan penunjukan kepada seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat.

Seseorang yang akan menjadi wali ditunjuk oleh pengadilan dan disahkan melalui penetapan. Selain itu wali juga harus memiliki agama yang sama dengan anak, serta wajib menjaga keberadaan harta kekayaan anak yang di bawah perwaliannya.⁶¹ Terdapat beberapa tanggung jawab orang tua atau wali pada pasal 26 yaitu:

- a. Melakukan pengasuhan, pemeliharaan, menjamin pendidikan dan perlindungan terhadap pribadi anak.

⁶¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 61.

- b. Merawat anak dengan mengedepankan kemampuan, bakat dan minat anak.
- c. Berupaya agar tidak terjadinya perkawinan dalam usia anak,
- d. Mendidik anak agar memiliki karakter dan moral yang baik.

Undang-undang perlindungan anak sangat mengutamakan keamanan anak baik dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Anak harus mendapat perlindungan dari tindak diskriminasi, segala bentuk eksploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, dan segala bentuk tindakan buruk lainnya baik itu fisik ataupun mental yang dapat merugikan anak.

Wali dalam pasal 34 undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memiliki kewenangan untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum di pengadilan ataupun diluar pengadilan. Ini dikarenakan anak masih belum bisa melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa sehingga membutuhkan wakil untuk mewakili segala Tindakan hukumnya.

Terkait harta benda anak yang masih belum ditetapkan siapa walinya di pengadilan, maka harta tersebut akan diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang memiliki wewenang. Pengurusan harta tersebut tentunya harus melalui penetapan pengadilan dahulu agar sah.

Perwalian berakhir dengan penetapan pengadilan sehingga status wali seseorang dicabut dan diganti oleh orang lain, disebabkan oleh:

- a. Sebab alasan tertentu si wali tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
- b. Wali menyalahgunakan wewenangnya yang merugikan anak.
- c. Wali meninggal dunia.⁶²

6. Keterbelakangan Mental (Retardasi Mental)

Keterbelakangan mental atau lebih sering disebut dengan retardasi mental merupakan gangguan terhadap kejiwaan seseorang. Rudi Maslim menjelaskan bahwa retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap yang terutama ditandai oleh terjadinya gangguan keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, diantaranya kemampuan kognitif, motoric, bahasa dan sosial.⁶³

Menurut Kaplan retardasi mental adalah sebuah gangguan yang heterogen yang terdiri dari fungsi intelektual yang di bawah rata-rata dan gangguan terhadap keterampilan adaptif yang ditemui sebelum seseorang berumur 18 tahun. Gangguan ini disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan dan psikososial. Fungsi intelektual dilihat dengan menggunakan tes kecerdasan yang dikenal dengan IQ (*Intelligent quotient*) atau nilai kecerdasan.⁶⁴

⁶² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia...*, 61.

⁶³ Rusdi Maslim, *Diagnosa Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas Dari PDJ-III*, (Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya, 2001), 119.

⁶⁴ Harnold I. Kaplan dkk, *Sinopsis Psikiatri, jilid 2*, Terj. Widya Kusuma, (Tangerang: Binarupa Aksara Publisher, 2010), 689.

Hallahan dan kauffman menyebutkan keterbelakangan mental adalah salah satu jenis gangguan yang bisa dijumpai dimanapun, dengan ciri-ciri penderitanya yang hanya mempunyai tingkat kecerdasan di bawah rata-rata ($IQ < 75$), mengalami kesulitan dalam beradaptasi dan sulit dalam beraktivitas sosial. Dalam kasus anak dan remaja pengidap keterbelakangan mental, mereka masih memiliki kemampuan lain yang jika dioptimalkan dapat membantunya dalam beraktivitas dalam masyarakat walaupun terbatas. Hal ini terjadi jika lingkungan sekitarnya memberi kesempatan dan membantu dalam mempelajari berbagai keterampilan hidup.⁶⁵

Pengkategorian tingkatan keterbelakangan mental atau retardasi mental yang menggunakan metode biasa sangat sulit bahkan tidak mungkin dilakukan dengan penyebab terdapat gangguan sensorik atau fisik. Seperti tuli, buta, bisu, penderita yang perilakunya terganggu berat sebab fisiknya tidak mampu. Berdasarkan nilai fungsi intelektualnya (IQ) retardasi mental memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Retardasi Mental Ringan (IQ 50-69)

Penderita retardasi mental ringan bisa berkomunikasi dengan lancar dan bersosial dengan masyarakat dengan baik. Masih bisa mengurus diri dengan baik. Tetapiambat dalam mempelajari

⁶⁵ Wiwin Hendriani, dkk, "Penerimaan Keluarga Terhadap Individu yang Mengalami Keterbelakangan Mental," *Insan*, no.2(2006): 101

kemampuan penyesuaian diri. Pada dasarnya berfungsi seperti orang normal dengan keterbatasan yang bisa dilatih.

2. Retardasi Mental Sedang (IQ 35-49)

Penderita retardasi mental sedang pada dasarnya dapat mengurus dirinya sendiri dan melakukan aktifitas yang mudah. Bisa mempelajari hal dasar terkait kesehatan dan keselamatan diri. Tetapi memiliki kekurangan berupa kemampuan menyesuaikan diri yang rendah, terutama kemampuan bahasa.

3. Retardasi Mental Berat (IQ 20-34)

Penderita retardasi mental berat bisa dilatih dalam mengurus diri yang mudah. Tetapi kemampuan penyesuaian diri sangat rendah dan kemampuan komunikasi hampir tidak ada, kadang bisa memberi sedikit respon. Penderita retardasi mental berat selalu membutuhkan pengawas terhadap dirinya

4. Retardasi Mental Sangat Berat (IQ dibawah 20)

Penderita retardasi mental sangat berat biasanya disertai cacat bawaan lahir sehingga membutuhkan bantuan dan pengawasan ketat dalam mengurus dirinya. Selain masalah kecerdasan dan kemampuan adaptasi yang sangat rendah, penderita retardasi mental sangat berat

bisa juga memiliki gejala akibat penyakit yang dideritanya seperti kejang setelah trauma.⁶⁶

Keterbelakangan mental atau retardasi mental terjadi karena beberapa sebab seperti faktor lingkungan dan genetik. Berikut beberapa penyebab terjadinya retardasi mental, yaitu:

1. Otak yang memiliki kelainan anatomis.
2. Saat persalinan yang susah dan lama sehingga saat di dalam kandungan kekurangan oksigen.
3. Mengalami cedera kepala berat yang mengakibatkan kerusakan pada otak.
4. Menderita kanker ganas pada otak.
5. Infeksi selama di dalam kandungan, yaitu toksoplasma, sitomegalovirus (CMV), rubella, herpes simpleks dan sifilis.
6. Ibu demam ketika mengandung.
7. Ibu mengonsumsi alkohol dan obat anti kejang selama kehamilan.
8. Kekurangan hormon tiroid yang merupakan pengendali sistem kekebalan dan pertumbuhan anak. Karena kurang mengonsumsi yodium selama dikandung dan awal kehidupan.
9. Faktor prenatal (masa kandungan) dan perinatal (masa kelahiran).

⁶⁶ Harnold I. Kaplan dkk, *Sinopsis Psikiatri, jilid 2*, Terj. Widya Kusuma..., 692.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tentang Duduk Perkara pada Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm

Dalam mendeskripsikan pertimbangan hakim supaya lebih mudah, penulis akan menjabarkan tentang duduk perkara dalam penetapan ini. Perkara nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm merupakan perkara *volunteer* atau permohonan yang hasilnya nanti berupa penetapan. Pemohon dalam perkara ini adalah A yang memohon untuk penunjukan wali terhadap anak dari saudaranya yang mengalami keterbelakangan mental. Saudaranya tersebut bernama E dan anaknya yang membutuhkan penunjukan wali bernama P. Dalam mengajukan permohonannya pemohon menguraikan alasan-alasan atau dalil yang menjadi dasar permohonan atau disebut dengan posita, sebagai berikut:

1. Bahwa, saudara Pemohon yang bernama E merupakan wanita yang telah melahirkan anak perempuan yang bernama P yang lahir diluar pernikahan yang sah dikarenakan E memiliki penyakit keterbelakangan mental dan merupakan korban dari kasus hukum pemerkosaan;
2. Bahwa, Pemohon (A) merupakan kepala Kaum di Desa Dusun B dan bertindak atas nama keluarga untuk E;
3. Bahwa, E, telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama P, tempat lahir Dusun B, September 2003, namun anak

tersebut lahir tidak terjadi didalam pernikahan yang sah dikarenakan E hamil karena merupakan korban dari tindakan pemerkosaan oknum yang tidak diketahui sampai sekarang;

4. Bahwa, Pemohon adalah kepala kaum yang bertindak atas nama keluarga dan telah ditunjuk oleh keluarga dari E sebagai wakil dari keluarga dan Pemohon mohon untuk di tetapkan sebagai wali dari anak yang bernama P binti E (wali ibu) guna pengurusan Dispensasi kawin terhadap P binti E;
5. Bahwa, E sebagai wali kandung P binti E karena memiliki penyakit keterbelakangan mental sehingga tidak cakap secara hukum;
6. Bahwa, berhubung E sebagai wali kandung P binti E memiliki penyakit keterbelakangan mental sehingga tidak cakap hukum maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko kiranya dapat menetapkan Pemohon sebagai Wali dari keponakan Pemohon P binti E, untuk pengurusan dispensasi kawin;
7. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali ke Pengadilan Agama Mukomuko ini adalah untuk pengurusan dispensasi kawin P binti E, yang mana P binti E mau melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang bernama X bin J, lahir Agustus 2000, namun dikarenakan P binti E belum mencukupi umur untuk dilangsungkannya pernikahan maka

diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Mukomuko;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
9. Bahwa, sebagai pertimbangan Pemohon lampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Surat Keterangan atas nama A pada Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
 - b. Fotokopi Kartu keluarga atas nama E pada November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupate Mukomuko;
 - c. Fotokopi Kartu Domisi atas nama P pada november 2019, yang dikeluarkan oleh PJS Kepala Desa Dusun Baru Pelokan, Kecmatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama E Nomor pada November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

Atas dasar dalasan-alasan tersebut pemohon memohon kepada majelis hakim agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari P binti E;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Dalam waktu persidangan pemohon dan P binti E menghadiri persidangan dan tidak merubah isi permohonan yang diajukan. Selain bukti tertulis pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yaitu R binti K dan B bin H yang merupakan tetangga pemohon yang dibawah sumpah 2 orang saksi tersebut memberi keterangan yang pada intinya membenarkan semua dalil-dalil permohonan. Selain itu juga menyebutkan bahwa pemohon adalah orang yang baik dan taat beragama serta orang yang amanah dan bertanggung jawab terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya.

B. Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm Tentang Perwalian Anak Luar Nikah Akibat Ibu Mengalami Keterbelakangan Mental

Anak luar nikah atau luar kawin adalah anak yang merupakan hasil dari hubungan luar kawin. Luar kawin memiliki arti hubungan antara pria dan wanita yang melahirkan keturunan tetapi hubungan tersebut tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum positif dan hukum agama masing-masing.⁶⁷ Dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak luar kawin

⁶⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 80.

hanya memiliki hubungan perdata atau hubungan biologis dengan ibu dan orang tua ibunya.

Setelah melihat uraian di atas dapat dipahami bahwa status anak luar nikah memiliki hubungan keperdataan hanya terhadap ibu dan keluarga ibunya. Dengan kata lain hubungan keperdataan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap orang tua dan anak. Sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang No 1 tahun 1974 bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan akan berada dalam kekuasaan orang tuanya yang akan mewakili anak tersebut dalam segala bentuk perbuatan hukum.

Dalam perkara di Pengadilan Agama Mukomuko nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm terdapat permohonan penunjukan wali oleh paman terhadap keponakannya yang merupakan anak luar nikah. Masalah perwalian yang dimaksud disini bukanlah perwalian dalam hal wali pernikahan. Perwalian yang dimaksud disini adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁶⁸

KUH Perdata memfokuskan permasalahan perwalian terjadi pada anak yang belum dewasa. Ini tertera dalam pasal 330 yaitu anak yang belum dewasa berada di bawah perwalian. Kemudian pasal ini menjelaskan juga

⁶⁸ Pasal 1 huruf (h) *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 10.

bahwa anak yang belum dewasa adalah yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin, apabila belum 21 tahun tetapi perkawinannya dibubarkan maka anak tersebut kembali menjadi belum dewasa.

Tetapi berbeda dengan KUH Perdata, menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah mereka yang belum beruisa 18 tahun. Demikian pada dasarnya KUH Perdata dalam pasal 330 menyatakan bahwa batas usia dewasa itu adalah 21 tahun. Akan tetapi orang juga dibilang dewasa jika ia sudah melakukan perkawinan meskipun belum berusia 21 tahun. Syarat usia menikah dalam Undang-undang Perkawinan terbaru mengatakan yaitu 19 tahun, baik pria maupun wanita.

Dalam perkara permohonan penunjukan wali ini anak tersebut masih belum berusia 18 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Sehingga anak tersebut masuk kedalam kriteria anak yang membutuhkan perwalian. Sebab tanpa adanya perwalian anak tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa anak luar nikah berada di bawah kekuasaan ibu dan keluarga ibu. Disini ibu dari anak yang diminta perwaliannya itu masih hidup dimana seharusnya ibu tersebutlah yang menjadi wali anak tersebut. Dalam perwalian terdapat asas tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaaraeid*) dimana hanya boleh ada satu wali dalam sebuah perwalian, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa

apabila paman mengajukan permohonan penunjukan wali akan mengakibatkan bertambahnya wali terhadap anak tersebut. Tetapi diketahui bahwa ibu tersebut mengalami keterbelakangan mental sehingga anak tersebut pada dasarnya tidak memiliki wali yang menjadi wakil terhadap dirinya jika melakukan perbuatan hukum.

Dalam pertimbangannya hakim menggunakan pasal 379 KUH Perdata menyebutkan bahwa terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi wali, sebagai berikut:

- 1) Pejabat-pejabat pengadilan
- 2) Orang yang sakit ingatan
- 3) Orang yang belum dewasa
- 4) Orang yang dibawah pengampuan
- 5) Orang yang telah dicabut kekuasaan sebagai orang tua perwalian
- 6) Para anggota pimpinan Balai Peninggalan Harta.

Salah satu dari kriteria orang yang dikecualikan menjadi wali adalah orang yang sakit ingatan. Keterbelakangan mental termasuk kedalam poin ini dimana keterbelakangan mental atau lebih sering disebut dengan retardasi mental merupakan gangguan terhadap kejiwaan seseorang. Rudi Maslim menjelaskan bahwa retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap yang terutama ditandai oleh terjadinya gangguan keterampilan selama masa perkembangan,

sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, diantaranya kemampuan kognitif, motoric, bahasa dan sosial.⁶⁹

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang mengalami keterbelakangan mental tidak bisa menjadi wali. Selain itu dalam pasal 50 ayat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan syarat anak yang memperoleh perwalian, yaitu:

- 6) Pria atau perempuan yang berusia di bawah 18 tahun.
- 7) Belum kawin.
- 8) Tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.
- 9) Tidak berada dibawah kekuasaan wali.
- 10) Perwalian terhadap pemeliharaan anak dan harta benda anak tersebut.

Kemudian syarat menjadi wali dalam undang-undang perkawinan terdapat pada pasal 51 ayat (2) dan juga dalam KHI yang isinya serupa yaitu sudah dewasa, berakal, jujur, memiliki niat yang baik untuk menjadi wali.⁷⁰

Perkara permohonan yang diajukan ini telah sesuai dengan peraturan yang ada dimana anak yang akan memperoleh hak perwalian tersebut belum dewasa dan belum kawin, tidak dalam perwalian orang tua atau wali. Dan juga wali kandung anak seharusnya yaitu ibu tidak mencukupi syarat untuk

⁶⁹ Rusdi Maslim, *Diagnosa Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas Dari PDJ-III*, (Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya, 2001), 119.

⁷⁰ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia...*, 144.

menjadi seorang wali dimana ibu tersebut mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak memenuhi syarat menjadi seorang wali.

Dalam permohonan ini diketahui juga bahwa anak tersebut membutuhkan penunjukan wali dikarenakan ia akan melakukan pengurusan dispensasi nikah yang mana itu adalah suatu perbuatan hukum. Anak tersebut belum cakap hukum dan juga wali kandungnya juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali karena mengalami keterbelakangan mental.

Wali memiliki tugas salah satunya yaitu mewakili anak dalam melakukan semua tindak perdata. Seperti yang disebut dalam KUH Perdata pasal 383 dan pasal 1 KHI. Dalam pasal 34 undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak lebih jelas menjelaskan tentang wewenang wali yaitu memiliki kewenangan untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum di pengadilan ataupun diluar pengadilan. Ini dikarenakan anak masih belum bisa melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa sehingga membutuhkan wakil untuk mewakili segala tindakan hukumnya.

Supaya anak tersebut memiliki wali yang mewakilkan perbuatan hukum, maka pamannnya memohon penunjukan wali terhadap anak tersebut. Hakim dalam pertimbangannya mengutip dasar hukum yaitu pasal 51 ayat (2) undang-undang perkawinan bahwa wali sebisanya berasal dari keluarga anak yang dewasa, berakal, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Diketahui bahwa paman yang memohon tersebut bertindak sebagai wakil yang ditunjuk oleh keluarga ibu dari anak tersebut. Hal ini sesuai dengan asas perwalian yaitu asas persetujuan keluarga dimana keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian, dimana jika keluarga tidak ada, maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu.⁷¹

Dalam keterangan saksi menjelaskan bahwa pemohon terbukti orang yang baik, taat beragama, amanah, jujur dan adil, serta bertanggung jawab dalam menguru dan memelihara anak yang dalam perwaliannya. Kemudian atas pertimbangan hakim menggunakan keterangan saksi tersebut dalam mengabulkan permohonan pemohon.

Keterangan saksi yang dijadikan pertimbangan hakim tersebut menguatkan pemohon untuk menjadi wali karena dalam pasal 51 ayat (2) dan juga dalam KHI yang isinya serupa yaitu wali harus dewasa yang sebisanya berasal dari keluarga anak, berakal, jujur, memiliki niat yang baik untuk menjadi baik.

Oleh karena itu permohonan yang diajukan pemohon tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa anak yang belum dewasa membutuhkan wali dalam mewakilkan tindakan hukumnya, tetapi dalam hal anak luar nikah yang menjadi wali seharusnya adalah ibu, akan tetapi dikarenakan ibu dari anak tersebut tidak memenuhi

71 R. Soetjono dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga...*, 188.

syarat menjadi wali akibat mengalami keterbelakangan mental menyebabkan anak tersebut tidak ada wali. Dikarenakan anak tersebut akan melakukan suatu perbuatan hukum yaitu pengurusan dispensasi nikah maka harus ada penunjukan wali kepada dirinya. Sehingga pamannya yang masih keluarga dari anak tersebut mengajukan permohonan penunjukan wali yang mana paman sudah memenuhi syarat untuk menjadi wali.

Dalam pertimbangannya hakim hanya menggunakan dua dasar hukum, yaitu pasal 379 KUH Perdata yang menjelaskan terkait orang yang sakit ingatan tidak bisa menjadi wali dan pasal 51 ayat (2) undang-undang perkawinan terkait wali sebisanya dari keluarga anak atau orang lain yang dewasa, berakal, adil, jujur serta berkelakuan baik. Menurut penulis hakim terlalu sedikit menggunakan dasar hukum dalam pertimbangannya dimana masih banyak pasal lain yang mendukung terkait perkara tersebut. Sehingga ada beberapa ketentuan yang seharusnya ada dipertimbangan tetapi tidak dicantumkan.

Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali pada dasarnya menjelaskan secara sangat rinci terkait syarat dan tata cara penunjukan wali. Dikarenakan pemohon penunjukan wali adalah paman dengan kata lain masih dari keluarga anak, maka dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yang melaksanakan pasal 33 ayat (5) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun

2002, bahwa keluarga anak yang akan menjadi wali harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. WNI yang berdomisili tetap di Indonesia
2. Berusia minimal 30 tahun
3. Sehat fisik dan mental
4. Berkelakuan baik
5. Mampu dalam ekonomi
6. Memiliki agama yang sama dengan anak
7. Jika sudah menikah harus ada persetujuan istri/suami dalam bentuk tertulis.
8. Membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali
9. Membuat pernyataan tertulis bahwa tidak akan pernah melakukan:
 - a. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak
 - b. Melakukan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk alasan mendisiplinkan anak
10. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat
11. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika : masih ada, diketahui keberadaannya, cakap berbuat hukum.
12. Wali yang akan ditunjuk diusahakan yang memiliki kedekatan dengan anak.

Dalam bab iii PP ini yaitu dalam pasal 11 dan 12 ayat (1) menyebutkan bahwa orang yang akan ditunjuk sebagai wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat yang akan menjadi bahan hakim mempertimbangkan dalam penetapan wali.

Sehingga dalam pandangan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yang melaksanakan pasal 33 ayat (5) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002, penetapan hakim yang mengabulkan permohonan masih kurang dalam bukti yang menjadi dasar pertimbangannya. Dalam permohonan ini tidak ada dilampirkan persetujuan tertulis dari suami/istri jika sudah menikah, surat pernyataan bersedia menjadi wali, pernyataan tertulis tidak akan pernah melakukan: kekerasan, eksploitasi, penelantaran serta perlakuan salah atau hukuman fisik terhadap anak dengan alasan apapun. Juga tidak melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat. Beberapa kekurangan tersebut tercantum dalam PP tersebut yang mana diketahui bahwa Peraturan Pemerintah masuk kedalam hierarki Perundang-undangan.

Meskipun dalam pertimbangannya hakim tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, tetapi alangkah lebih baiknya hakim lebih teliti. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan

bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sehingga jika dilihat lebih lanjut ditakutkan penetapan ini bisa dibilang penetapan yang tidak cukup dalam pertimbangan yang merupakan masalah yuridis sehingga bisa dibatalkan dalam tingkat kasasi.

C. Penetapan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-undang perlindungan anak sangat mengutamakan keamanan anak baik dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Anak harus mendapat perlindungan dari tindak diskriminasi, segala bentuk eksploitasi, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, dan segala bentuk tindakan buruk lainnya baik itu fisik ataupun mental yang dapat merugikan anak.

Dalam penetapan nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm mengabulkan permohonan pemohon yaitu paman dari seorang anak luar nikah yang masih dalam usia anak yang ibunya mengalami keterbelakangan mental. Tujuan pemohon melaukan penunjukan wali agar anak tersebut memiliki wali yang mewakilinya dalam perbuatan hukum yang akan dilakukannya setelah ia memiliki wali, yaitu pengurusan atau sidang dispensasi nikah karena anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan.

Wali dalam pasal 34 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memiliki kewenangan untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Ini dikarenakan anak masih belum bisa melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa sehingga membutuhkan wakil untuk mewakili segala Tindakan hukumnya. Atas dasar penetapan penunjukan wali, maka timbul kewajiban wali terhadap anak yang di bawah perwaliannya.

Dalam undang-undang perlindungan anak pasal 26 undang-undang nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa apabila orang tua disebabkan alasan tertentu tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka kewajiban tersebut beralih ke walinya.

Salah satu kewajibannya dalam pasal 26 tersebut yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa tujuan pemohon melaukan penunjukan wali adalah agar anak tersebut memiliki wali yang mewakilinya dalam perbuatan hukum yang akan dilakukannya setelah ia memiliki wali, yaitu pengurusan atau sidang dispensasi nikah karena anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan.

Sebagaimana yang diketahui dalam pasal 47 Undang-Undang No 1 tahun 1974 bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan akan berada dalam kekuasaan orang tuanya

yang akan mewakili anak tersebut dalam segala bentuk perbuatan hukum. Sehingga apabila seorang anak yang dibawah 18 tahun melangsungkan pernikahan maka ia sudah bisa melakukan perbuatan hukumnya sendiri tanpa diwakili oleh orang lain.

Dengan kata lain, jika seorang anak yang ditunjuk kepada dirinya seorang wali, tetapi perwaliannya tersebut hanya digunakan untuk perantara dirinya melakukan perkawinan. Setelah anak tersebut menikah maka status perwalian itupun berakhir sebab anak yang walaupun masih di bawah usia 18 tahun jika sudah menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga menurut konvensi hak anak yang merupakan landasan dalam undang-undang perlindungan anak maka ia masuk kedalam kategori orang dewasa yang sudah cakap hukum sehingga bisa melakukan perbuatan hukumnya tanpa perlu ada wali yang mewakilinya,

Pandangan undang-undang perlindungan terkait masalah perwalian ini terdapat dalam pasal 16 dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yang melaksanakan pasal 33 ayat (5) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002, yaitu mengenai berakhirnya wali sebagai berikut:

1. Anak sudah berusia 18 tahun
2. Anak meninggal dunia
3. Wali meninggal dunia, atau
4. Wali yang badan hukum bubar atau pailit.

Dari pasal ini dapat diketahui bahwa anak yang akan terputus perwaliannya dengan walinya jika ia sudah mencapai usia 18 tahun. Dari sini kita mendapat titik cerah dimana menurut aturan ini tidak menjelaskan bahwa jika seorang anak menikah akan lepas pula status perwalian dengan walinya. Perubahan terjadi hanya pada anak tersebut sudah digolongkan menjadi cakap hukum sehingga bisa melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi hak dan kewajiban seorang wali terhadap anak masih ada.

Sehingga permasalahan bagaimana kewajiban wali terhadap anak yang dibawah kuasanya jika melakukan pernikahan sudah dapat dijawab. Yaitu selama anak yang di bawah kekuasaan perwalian masih di bawah umur, jika anak tersebut menikah maka tidak akan mengakibatkan berakhirnya perwalian. Sehingga wali masih memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak tersebut.

Menurut pandangan peraturan KUH Perdata dan KHI, anak yang sudah mencapai usia 21 tahun maka perwaliannya berakhir, lain halnya menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan undang-undang perlindungan anak bahwa perwalian berakhir apabila anak sudah mencapai usia 18 tahun.

Selain batas umur diatas menurut aturan di atas perwalian juga akan berakhir jika anak meninggal dunia, wali meninggal dunia, atau perwalian dicabut oleh pengadilan. Ali Afandi juga mengatakan hal yang sama seperti dalam peraturan di atas. Selain itu, menurut KHI dan undang-undang

perkawinan menyebutkan bahwa perwalian juga berakhir jika anak melakukan perkawinan.

Selanjutnya masalah satunya lagi yaitu masalah mengenai pasal 26 undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang merubah undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya perkawinan dalam usia anak.

Semenjak Konvensi Hak Anak PBB disahkan lewat Kepres nomor 36 tahun 1990, Indonesia terikat secara moral, politis dan yuridis akan menghormati, melindungi dan memenuhi segala hak anak. Sebagaimana yang ditegaskan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa negara, pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga bertanggung jawab dan berkewajiban terhadap segala hak anak.

Dalam pasal 23 dan 24 undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang merubah undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan dan juga kesejahteraan anak dengan mengawasi hak dan kewajiban orang tua atau wali.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas mengatur bahwa batas usia melakukan perkawinan yaitu pada usia 21 tahun. Jika belum mencapai usia tersebut maka harus meminta izin kedua orang tua pihak pria dan wanita. Perkawinan hanya diizinkan ketika calon

mempelai baik itu pria maupun wanita sudah berusia 19 tahun, ini sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jika calon mempelai belum berusia 19 tahun maka harus meminta dispensasi ke pengadilan.

Dalam penetapan ini hakim mengabulkan permohonan dimana dengan jelas pemohon dalam dalil permohonannya menjelaskan bahwa penunjukan wali tersebut adalah untuk pengurusan dispensasi nikah. Dalam perkara ini bahkan sebelum penetapan penunjukan perwalian tersebut ditetapkan atau dikabulkan telah terdapat pertentangan dari undang-undang perlindungan anak, yaitu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban serta bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya perkawinan di usia anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam perkara di Pengadilan Agama Mukomuko nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm hakim hanya menggunakan dua dasar hukum dalam pertimbangannya, yaitu pasal 379 KUH Perdata yang menjelaskan terkait orang yang sakit ingatan tidak bisa menjadi wali dan pasal 51 ayat (2) undang-undang perkawinan terkait wali sebisanya dari keluarga anak atau orang lain yang dewasa, berakal, adil, jujur serta berkelakuan baik. Meskipun dalam pertimbangannya hakim tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, tetapi alangkah lebih baiknya hakim lebih teliti. Sehingga jika dilihat lebih lanjut ditakutkan penetapan ini bisa dibilang penetapan yang tidak cukup dalam pertimbangan yang merupakan masalah yuridis sehingga bisa dibatalkan dalam tingkat kasasi. Seperti permohonan ini tidak ada dilampirkan persetujuan tertulis dari suami/istri jika sudah menikah, surat pernyataan bersedia menjadi wali, pernyataan tertulis tidak akan pernah melakukan: kekerasan, eksploitasi, penelantaran serta perlakuan salah atau hukuman fisik terhadap anak dengan alasan apapun. Juga tidak

melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat. Dimana syarat-syarat yang kurang tersebut menurut Peraturan Pemerintah nomor 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan wali.

- b. Penetapan nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm jika dilihat dari perspektif undang-undang perlindungan anak terdapat dua masalah yang timbul. Pertama, terkait status perwalian anak jika anak tersebut menikah sebelum usia 18 tahun. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yang melaksanakan pasal 33 ayat (5) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002, menurut aturan pasal 14 tidak menjelaskan bahwa jika seorang anak menikah akan mengakibatkan berakhirnya atau lepasnya status perwalian dengan walinya. Perubahan terjadi hanya pada anak tersebut sudah digolongkan menjadi cakap hukum sehingga bisa melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi hak dan kewajiban seorang wali terhadap anak masih ada. Kedua, pasal 26 undang-undang perwalian anak yaitu wali berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan saat masih usia anak. Tetapi dalam penetapan ini hakim mengabulkan permohonan dimana dengan jelas pemohon dalam dalil

permohonannya menjelaskan bahwa penunjukan wali tersebut adalah untuk pengurusan dispensasi nikah. Dengan adanya peraturan yang menyebutkan wali bertanggung jawab mencegah terjadinya pernikahan dalam usia anak, penetapan tersebut terlihat seperti mempermudah terjadinya pernikahan ini sekaligus mengabaikan pasal 26 undang-undang perlindungan anak.

B. Saran

Melihat hasil dari penelitian terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Mukomuko dengan nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Mkm tentang perwalian anak luar nikah akibat ibu mengalami keterbelakangan mental. Hakim Pengadilan Agama Mukomuko sebaiknya lebih teliti dan rinci dalam menjelaskan dasar hukum yang digunakannya dalam mempertimbangkan suatu penetapan atau putusan. Sehingga tidak akan terulang lagi hakim kurang teliti dalam menuangkan dasar hukum yang akan digunakannya yang mengakibatkan kurangnya syarat yang seharusnya jadi pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Cet ke-1. Jakarta: Akademia Pressindo, 2000.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kaplan, Harnold I., dkk, *Sinopsis Psikiatri, jilid 2*. Terj. Widya Kusuma. Tangerang: Binarupa Aksara Publisher, 2010.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Marzuki, Piter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. XII. Jakarta: Kencana, 2016.
- Maslim, Rusdi. *Diagnosa Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas Dari PDJ-III*. Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*. Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984.
- R. Soetjono dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet ke-4. Bandung: Alimni, 1972.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Saleh, K. Wantijk. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Setyowati, Irma. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa, 1989.

- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sulistini, Elise T. dan Rudy T. Erwin. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Summa, Muhammad Amin. *hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syahpurta, Akmaluddin. *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006.
- Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jilid 1. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pusaka Setia, 2017.

2. Jurnal

- Fitriani, Rini, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, no. 2(2016): 251
- Friatna, Ida. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008,” *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, no.2(2019): 61.
- Hendriani, Wiwin., dkk. “Penerimaan Keluarga Terhadap Individu yang Mengalami Keterbelakangan Mental,” *Insan*, no.2(2006): 101
- Ishak. “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 3(2017): 582
- Lubis, Nadira., Hetty Krisnani dan Muhammad Ferdiansyah. “Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa dan Keterbelakangan Mental,” *Prosding KS: Riset & PKM*, no 3(2015): 389

3. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Kompilasi Hukum Islam

4. Skripsi / Tesis

Awanah, Lutfi Nailil. “Permohonan Perwalian Oleh Ibu Kandung Atas Anaknya Untuk Melakukan Transaksi Penjualan Tanah Waris”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Fatimah, Siti. “Analisis hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/PDT.P/2013/PA.MLG Tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur”, Digital Library, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Harca, Yudhi Marza. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwalian Terhadap Anak di Bawah Umur Korban Tsunami di Aceh”, Tesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2013. <http://repositori.usu.ac.id>

Mukaromah, Siti. “Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Tentang Tanggung Jawab Perwalian Anak yang Lahir dari Ibu di Bawah Umur Akibat Pemerkosaan oleh Ayah Tiri (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”, Digital Library, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Nugroho, Erban Hari. “Analisis Hukum Islam terhadap Perwalian Anak Oleh Ibu Tiri (Studi Kasus Penetapan PA Tuban dalam Perkara No. 003/Pdt.P/2006/PA. Tuban)”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010. <http://digilib.uinsby.ac.id/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Ibrahim Munib
	Tempat Tanggal Lahir	Padang, 17 Januari 2000
	Alamat	Jl. Parak Karakah Simpang Mushala Muslimin RT/RW 02/08 Kelurahan Kubu Dalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang
	Nomor HP	085264645950
	Email	ibrahimmunibsa@gmail.com

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	SDN 16 Tanjung Pandan	Tanjung Pandan, Belitung	2005-2011
2.	MTsN Durian Tarung Kota Padang	Durian Tarung, Kota Padang	2011-2014
3.	MAN 2 Kota Padang	Jl. Gajayana 50 Kota Padang	2014-2017

Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl Gajayana No.50 Malang	2017-2018